

RINGKASAN

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Timur merupakan implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 sebagai kewenangan Dinas Perhubungan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan mennguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan sebagai pengemban tanggung jawab di daerah mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut datangnya dari dalam Dinas Perhubungan itu sendiri atau yang biasa disebut faktor internal dan kendala yang datangnya dari luar Dinas Perhubungan atau yang biasa disebut faktor eksternal. Akibat dari adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak bisa dijalankan secara optimal sehingga kewenangan yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2008 tidak bisa dijalankan sebagaimana pertauran perUndang-Undangan yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kewenangan tersebut dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan metode penelitian yang menggunakan metode pendekatan normatif yaitu menghubungkan peraturan yang berlaku yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan metode pendekatan empiris yaitu mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu kondisi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, kurangnya SDM bidang pengujian kendaraan bermotor dan motivasi dari pelaksanaan tersebut yang masih berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian tersebut dibutuhkan kerja sama dan kepedulian dari semua pihak yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan khususnya Pengujian Berkala kendaraan bermotor untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor bisa dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.